KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final	
				<u> </u>					
A. IDE	NTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	N YANG	DIPOTONG					
A.1 NPWP : 1 4 5 3 9 4 4 9 0 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : NALENDRA NUGRAHA									
B. PP	h PASAL 21	I YANG DIPOTONG			г т			ī	
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	4	21-402-01		14.990.000	14.990.000	0	5	749.500	
Keter	angan Kode C	Objek Pajak : H	nor dan	Imbalan Lain yang Di	bebankan kepada APBN atau	APBD yang Dite	rima oleh PN	S, Anggota	
B.8	Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022								
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor : Tanggal									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11									
C. IDI	ENTITAS PE	MOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2	Nama Instar	nsi Pemerintah :	RUM	AH SAKIT JIWA DAEI	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI K	ALIMANTAN	TIMUR	
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4	C.4 Tanggal : 0 4			dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5	Nama Penan	na Penandatangan : RIANDY							
C.6	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.								
				i dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	

E8EGHX0Y